

Implementasi *Webmobile* Calon Penerima Bantuan Usaha Mikro Bank Lampung Untuk Pemberdayaan Ibu Rumah Tangga

Fiqih Satria¹⁾, Muhammad Junaidi²⁾, Siti Mukodimah³⁾, Jefrianto⁴⁾

^{1,2,3)}Prodi Sistem Informasi, STMIK Pringsewu, Lampung

⁴⁾Program Paka Sarjana Teknik Informatika, IIB Darmajaya, Lampung
Jl. Wisma Rini No 09 Pringsewu, Lampung, Indonesia

Jl. ZA. Pagar Alam No.93, Gedong Meneng, Lampung, Indonesia

e-mail: mukodimah97@gmail.com

Abstrak

Usaha Kecil Menengah (UKM) merupakan salah satu bidang yang memberikan kontribusi yang signifikan dalam memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini dikarenakan daya serap UKM terhadap tenaga kerja yang sangat besar dan dekat dengan rakyat kecil. Statistik pekerja Indonesia menunjukkan bahwa 99,5 % tenaga kerja Indonesia bekerja di bidang UKM [3]. Berdasarkan hasil penelitian firmansyah deckiyanto, (2013) menunjukkan bahwa efektifitas kebijakan pemberian kredit usaha rakyat (kur) mikro dalam surat edaran direksi nose: s.09c-dir/adk/03/2010 atas ketentuan kredit usaha rakyat (kur) mikro [4]. Perkreditan mikro selain dilihat dari segi produk dan kelembagaannya juga dapat dilihat dari segi “permintaan dan penawaran” atau dari sudut sumber dan penggunaan. Perkreditan mikro selain dilihat dari segi produk dan kelembagaannya juga dapat dilihat dari segi permintaan dan penawaran atau dari sudut sumber dan penggunaan. Gambaran ini akan menjelaskan pembagian kerja fungsional antar lembaga perkreditan mikro dengan berbagai kelompok sasaran berdasarkan tingkat pendapatan dan bahkan dapat sangat terkait dengan penggunaan kredit. Dalam rangka membantu pendapatan ibu-ibu rumah tangga perlu dilakukan pinjaman dari pihak perbankan terutama perbankan Daerah. Pengukuran dalam bentuk Aplikasi dan pembobotan Weighted Product dirasa penting didalam proses memudahkan pelaku usaha Mikro yang menjadi sumber pendapatan tambahan bagi ibu ibu rumah tangga.

Kata kunci: Usaha Mikro, WP, *Webmobile*, Model

1. Pendahuluan

Pengembangan usaha mikro di Indonesia merupakan salah satu prioritas dalam pembangunan ekonomi nasional. Hal ini selain karena usaha tersebut merupakan tulang punggung sistem ekonomi kerakyatan yang tidak hanya ditujukan untuk mengurangi masalah kesenjangan antar golongan pendapatan dan antar pelaku usaha, ataupun pengentasan kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja. Lebih dari itu, pengembangannya mampu memperluas basis ekonomi dan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mempercepat perubahan struktural, yaitu meningkatnya perekonomian daerah dan ketahanan ekonomi nasional. Dalam undang-undang no. 20 tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah secara tegas telah adanya pendefinisian pemisahan klasifikasi usaha. Pasal 1 uu nomor 20 tahun 2008 menyebutkan bahwa: pertama, usaha mikro adalah usaha produktif milik orang-perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang [1]. Sedangkan Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Usaha Mikro dan Kecil merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan

peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional [2].

Usaha Kecil Menengah (UKM) merupakan salah satu bidang yang memberikan kontribusi yang signifikan dalam memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini dikarenakan daya serap UKM terhadap tenaga kerja yang sangat besar dan dekat dengan rakyat kecil. Statistik pekerja Indonesia menunjukkan bahwa 99,5 % tenaga kerja Indonesia bekerja di bidang UKM [3]. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, menunjukkan bahwa efektifitas kebijakan pemberian kredit usaha rakyat (kur) mikro dalam surat edaran direksi nose: s.09c–dir/adk/03/2010 atas ketentuan kredit usaha rakyat (kur) mikro [4]. Perkreditan mikro selain dilihat dari segi produk dan kelembagaannya juga dapat dilihat dari segi “permintaan dan penawaran” atau dari sudut sumber dan penggunaan. Gambaran ini akan menjelaskan pembagian kerja fungsional antar lembaga perkreditan mikro dengan berbagai kelompok sasaran berdasarkan tingkat pendapatan dan bahkan dapat sangat terkait dengan penggunaan kredit. Pendekatan ini sekaligus untuk memahami dinamika perkembangan lembaga perkreditan mikro bagi pengembangan ekonomi rakyat. Hasil penelitian diharapkan kepada pemerintah hendaknya membuat aturan dari suatu jenis kredit yang lebih mudah dipahami dan dilaksanakan dengan baik oleh nasabah debitur, pihak bank dan lembaga pinjamin sehingga tidak menimbulkan salah pengertian, bagi perbankan. Permasalahan sampai saat ini, usaha mikro diwilayah lampung tengah masih belum bisa dianalisis mana yang akan menjadi calon penerima bantuan usaha mikro bank lampung, karena banyak sekali yang mengajukan untuk mendirikan usaha mikro atau usaha kecil.

2. Metode Penelitian

2.1. Metode Pengumpulan Data

Tahap Pengumpulan Data Pengumpulan data merupakan kegiatan mencari data dilapangan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian.

1. Observasi Metode ini pengumpulan data secara langsung pada subjek yang diteliti, mengenai aturan pemberian pembiayaan usaha mikro.
2. Interview Metode ini pengumpulan data dengan cara Tanya jawab kepada calon penerima usaha mikro mengenai permasalahan yang diteliti untuk memperoleh data tentang informasi tersebut.
3. Pustaka Metode ini pengumpulan data dengan cara mempelajari dan mengamati serta menganalisis berkas-berkas atau dokumen-dokumen yang sudah ada dan berhubungan dengan masalah tersebut.
4. Pengumpulan Data Quisioner Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kuisisioner sebagai instrument penelitian yaitu kuesioner Tahap 1 dan 2. Metode kriteria seleksi dan sub kriteria bobot terbagi menjadi dua tahap item, yaitu: 1) Kriteria seleksi dan sub kriteria (Kuesioner Tahap I) yang akan menjadi acuan utama dalam model hirarkis dalam menentukan Calon Penerima Bantuan menggunakan kuesioner Tahap 1. Perancangan sistem pembuatan keputusan atribut dengan Pembobotan Weighted Product. Pada tahap ini peneliti mengambil kriteria indikator yang dibuat dalam menentukan calon penerima bantuan dana usaha mikro dan kriteria gradasi akan dibuat. 2) Tahap II: Kriteria bobot dan prioritas dan subkriteria. 1. Pada tahap ini, berdasarkan hasil kuesioner 1, kuesioner dikembangkan untuk tahap kedua. Pada kuesioner tahap 2, responden diminta untuk menentukan kriteria pembobotan dan sub kriteria untuk mengisi kuesioner secara berpasangan dengan membandingkan kepentingan relatif kriteria dan subkriteria.

Untuk setiap kriteria atau variabel memiliki hasil dan bobotnya sendiri-sendiri. Dari kriteria yang ada lalu dibobotkan kemudian dibuat variabel-variabel yang akan diubah kedalam bilangan fuzzy yang bobot nilainya sebagai berikut: Sangat rendah (SR) = 0 Rendah (R) = 0,2 Sedang (S) = 0,4 Tengah (T1) = 0,6 5Tinggi (T2) = 0,8 angat tinggi (ST) = 1

Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif. Pada penelitian ini skala yang digunakan adalah Rating Scale (skala bertingkat). Rating Scale sendiri adalah skala pengukuran dimana data mentah yang diperoleh berupa angka kemudian ditafsirkan dalam pengertian kuantitatif. Yang terpenting dari penggunaan skala pengukuran rating scale adalah harus dapat mengartikan setiap angka yang diberikan pada alternatif jawaban pada setiap item instrumen [7], [8].

2.2. Metode Weighted Product

Metode Weighted Product menggunakan perkalian untuk menghubungkan rating atribut, dimana rating setiap atribut harus dipangkatkan dulu dengan bobot yang bersangkutan. Metode Weighted Product menggunakan perkalian untuk menghubungkan rating atribut, dimana setiap rating atribut harus dipangkatkan terlebih dahulu dengan bobot yang bersangkutan. [6] Metode weighted product dapat membantu dalam mengambil keputusan akan tetapi perhitungan dengan menggunakan metode weighted product ini hanya menghasilkan nilai terbesar yang akan terpilih sebagai alternatif yang terbaik. Perhitungan akan sesuai dengan metode ini apabila alternatif yang terpilih memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Preferensi untuk alternatif A_i diberikan sebagai berikut: Proses ini sama halnya dengan proses normalisasi. Preferensi untuk alternatif S_i diberikan sebagai berikut:

$$S_i = \prod_{j=1}^n x_{ij}^{w_j}$$

dengan $i = 1, 2, \dots, m$ (1)

dimana:

- S : Preferensi alternatif /vektor S
- X : Nilai kriteria
- W : Bobot kriteria/subkriteria
- I : Alternatif
- j : Kriteria
- n : Banyaknya kriteria

Dimana

$$\sum W_j = 1$$

Alternatif (A_i)

Alternatif A_i dengan $i = 1, 2, \dots, m$ adalah objek-objek yang berbeda dan memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih oleh pengambilan keputusan. Data yang digunakan adalah data menentukan calon penerima bantuan usaha mikro untuk pengklafikasian bantuan usaha mikro di Kabupaten Pringsewu.

Prefensi relatif dari setiap alternatif diberikan sebagai:

$$V_i = \frac{\prod_{j=1}^n X_{ij}^{w_j}}{\prod_{j=1}^n (X_j^*)^{w_j}} \dots\dots\dots(2)$$

Dimana:

V = Perefensi Alternatif
X = Nilai Kriteria
W = Bobot Kriteria

Wj adalah pangkat bernilai positif untuk atribut keuntungan dan bernilai negatif untuk atribut biaya. Preferensi relatif dari setiap alternatif [5].

3. Hasil dan Pembahasan

Tabel 1 berikut merupakan nilai bobot kriteria:

Tabel 1. Nilai Bobot Kriteria

Kode	Kriteria	Bobot
1	Jumlah Tenaga Kerja	10%
2	Status Kepemilikan Tanah	15%
3	Prosedur Administrasi/Izin Usaha	15%
4	Sarana dan Prasarana Usaha	15%
5	Omset Tiap Bulan	20%
6	Lama Usaha	15%
7	Penghasilan Keluarga	10%
	Total	100%

Tabel 2 berikut ini menampilkan 5 Alternatif dalam menentukan calon penerima bantuan usaha mikro Bank Lampung yang digunakan sebagai sample:

Tabel 2. Alternatif

Kode	Alternatif
A1	Nasabah 1
A2	Nasabah 2
A3	Nasabah 3
A4	Nasabah 4
A5	Nasabah 5

Tabel 3 berikut merupakan kriteria jumlah tenaga kerja:

Tabel 3. Kriteria Jumlah Tenaga Kerja

Kriteria	Bobot
15-20	1
10-14	0,8
5-9	0,6
<5	0,4

Tabel 4 berikut merupakan kriteria status kepemilikan tanah:

Tabel 4. Kriteria Status Kepemilikan Tanah

Kriteria	Bobot
Hak Milik	1
Hak Sewa Tanah	0,6
Hak Usaha Bagi Hasil	0,4
Hak Menumpang Karangannya	0,2

Tabel 5 berikut ini merupakan kriteria prosedur administrasi/izin usaha:

Tabel 5. Kriteria Prosedur Administrasi/ Izin Usaha

Kriteria	Bobot
SIUP Mikro	1
SIUP Menengah	0,8
SIUP Besar	0,6

Tabel 6 berikut ini merupakan kriteria sarana dan prasarana usaha:

Tabel 6. Kriteria Sarana dan Prasarana Usaha

Kriteria	Bobot
Sangat Lengkap	1
Lengkap	0,8
Cukup Lengkap	0,6
Kurang Lengkap	0,4

Tabel 7 berikut ini merupakan kriteria omset tiap bulan:

Tabel 7. Kriteria Omset Tiap Bulan

Kriteria	Bobot
Rp. 10.000.000/bln	1
Rp. 7.000.000/bln	0,8
Rp. 5.000.000/bln	0,6
Rp. 3.000.000/bln	0,4
Rp. <3.000.000/bln	0,2

Tabel 8 berikut ini merupakan kriteria lama usaha:

Tabel 8. Kriteria Lama Usaha

Kriteria	Bobot
3.5 – 5 Tahun	1
2.5 – 3 Tahun	0,6
1.5 – 2 Tahun	0,4
1 Tahun	0,2

Tabel 9 berikut merupakan kriteria penghasilan keluarga:

Tabel 9. Kriteria Penghasilan Keluarga

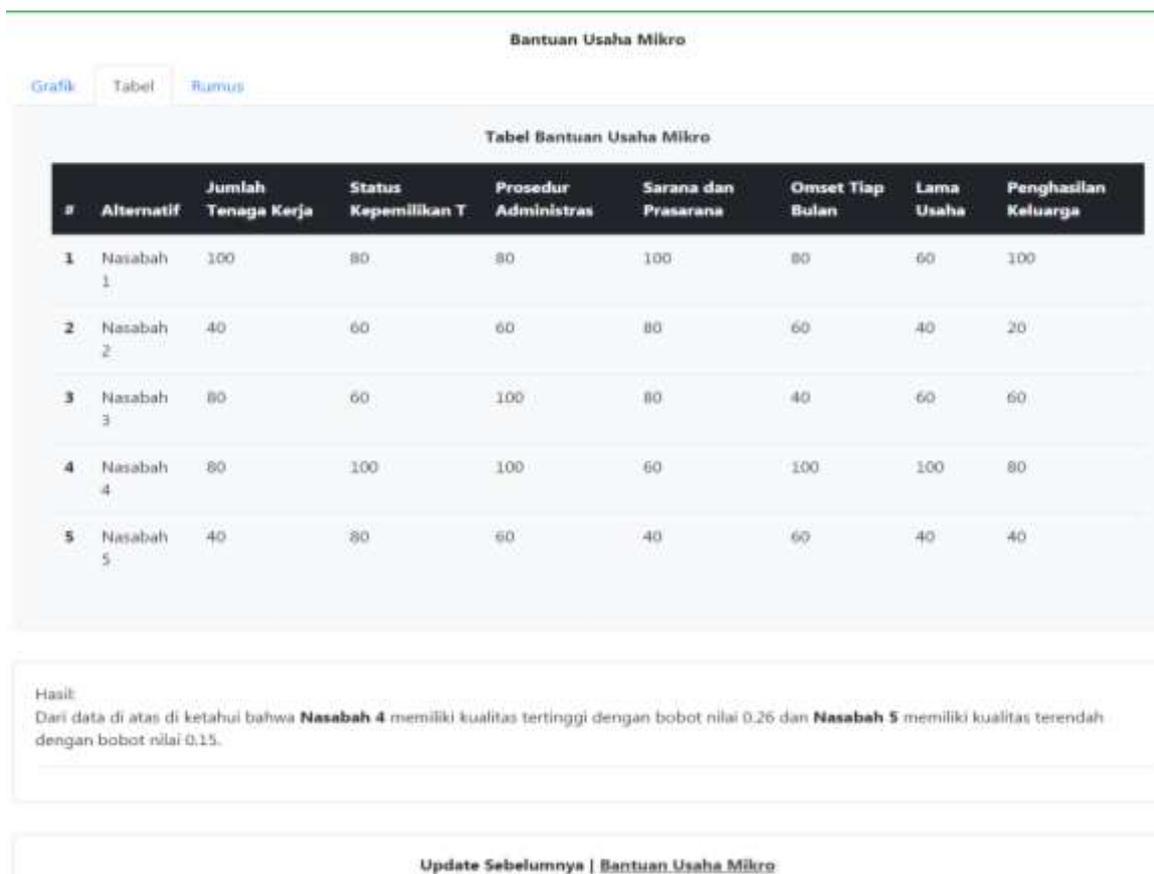
Kriteria	Bobot
0 – 450.000	1
451.000 – 800.000	0,8
801.000 -1.500.000	0,6
1.501.000– 3.000.000	0,4
>3.000.000	0,2

Tabel 10 berikut ini merupakan pembobotan alternatif tiap kriteria:

Tabel 10. Pembobotan Alternatif Tiap Kriteria

Alternatif	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
A1	1	0,8	0,8	1	0,8	0,6	1
A2	0,4	0,6	0,6	0,8	0,6	0,4	0,2
A3	0,8	0,6	1	0,8	0,4	0,6	0,6
A4	0,8	1	1	0,6	1	1	0,8
A5	0,4	0,8	0,6	0,4	0,6	0,4	0,4

Hasil Uji Aplikasi seperti yang ditampilkan pada gambar 1, gambar 2 dan gambar 3 berikut:



Gambar 1. Perhitungan



Gambar 2. Perhitungan Menggunakan Aplikasi



Gambar 3. Grafik Hasil Perhitungan

4. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penggunaan sistem pendukung keputusan dengan metode weighted product untuk menentukan calon penerima bantuan usaha mikro dapat dijadikan sebagai solusi menyelesaikan permasalahan penentuan calon penerima bantuan usaha mikro secara tepat. Dengan menerapkan beberapa kriteria sebagai kriteria dasar yang dijadikan sebagai acuan pengambilan keputusan penentuan calon penerima bantuan usaha.

Daftar Pustaka

- [1] B. Rifa, “Efektivitas Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Krupuk Ikan dalam Program Pengembangan Labsite Pemberdayaan Masyarakat Desa Kedung Rejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo,” *Kebijak. dan Manaj. Publik*, vol. 1, no. 1, hal. 1, 2013.
- [2] F. Ananda, “Analisis Perkembangan Usaha Mikro Dan Kecil Setelah Memperoleh Pembiayaan Mudharabah Dari BMT At Taqwa Halmahera Di Kota Semarang,” Universitas Diponegoro, 2011.
- [3] R. M. J. Hidayah Wati, Danang Kusnadi, Noca Yolanda Sari, “Implementasi E-Commerce Sebagai Media Promosi untuk Meningkatkan Pendapatan Usaha Kecil Menengah Produksi Kain Perca di Kecamatan Banyumas,” *J. Kelitbangan Bappeda Pringsewu*, vol. 1, no. 1, hal. 85–103, 2016.
- [4] M. Munizu, “Pengaruh Faktor-Faktor Eksternal dan Internal Terhadap Kinerja Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Sulawesi Selatan,” *J. Manaj. dan Kewirausahaan*, vol. 12, no. 1, hal. 33–41, 2010.
- [5] O. Sri Hartati, *Model Penentuan Program Karya Usaha Mandiri (KUM) Pola “Grameenbank” Menggunakan Metode Saw Sebagai Pemberdayaan Sumberdaya Wanita Pedesaan Kearah Pembangunan Ekonomi Wilayah*. 2014.
- [6] S. Kusumadewi, S. Hartati, A. Harjoko, dan Retanto Wardoyo, *Fuzzy Multi-Attribute Decision Making (Fuzzy MADM)*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- [7] W. Abdillah, *Metode Penelitian Terpadu Sistem Informasi (Pemodelan Teoritis, Pengukuran, dan Pengujian Statis)*. Yogyakarta: Penerbit Andi Yogyakarta, 2018.
- [8] S. Sangadji, Etta Mamang, *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit Andi Yogyakarta, 2010.